

IMPLEMENTASI PROGRAM PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN (P2KP) PADA KELOMPOK WANITA TANI DI KELURAHAN LEMPAKE KECAMATAN SAMARINDA UTARA

Ariyadi Saputra Alam¹

¹Mahasiswa Magister Administrasi Publik FISIP Unmul
Alamat Korespondensi : jurnal.adm.reform.mianunmul@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to describe and analyze the implementation of the acceleration of food consumption diversification (P2KP) program on the Women Farmers Group in Lempake Village, to identify and describe the supporting and inhibiting factors. This type of research is descriptive with a qualitative approach. The research location is in Lempake Sub-District, North Samarinda District. Data derived from interviews, observations and documents owned by farmer women's groups. Conclusions based on data processed using interactive model data analysis. Based on the results of the study, it was concluded that the implementation of the acceleration program of food consumption diversification (P2KP) on the women farmer groups in Lempake Village had been going well, although there were still things that needed improvement.

Keywords: *Implementation, Diversification, Food Consumption*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan (P2KP) pada Kelompok Wanita Tani di Kelurahan Lempake, mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambatnya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara. Data berasal dari wawancara, pengamatan dan dokumen yang dimiliki oleh kelompok wanita tani. Penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diolah dengan menggunakan analisis data model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa implementasi program percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan (P2KP) pada kelompok wanita tani di Kelurahan Lempake sudah berjalan dengan baik, meskipun masih ada yang harus diperbaiki.

Kata Kunci : *Implementasi, Penganeekaragaman, Konsumsi Pangan*

Pendahuluan

Pangan merupakan hal yang sangat penting dan mendasar serta strategis bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Kebutuhan manusia akan pangan adalah hal yang sangat mendasar, sebab konsumsi pangan merupakan salah satu syarat utama penunjang kehidupan. Pada konferensi tingkat tinggi (KTT) Pangan Sedunia tahun 1996 di Roma - Italia, para pemimpin negara dan pemerintah telah berikrar komitmen bersama untuk mencapai ketahanan pangan sebagai salah satu upaya untuk melawan kelaparan. Saat ini pangan telah ditetapkan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang penyelenggaraannya wajib dijamin oleh Negara.

Di Indonesia, penyelenggaraan urusan pangan diatur melalui Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 pengganti Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996, yang dibangun berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan. Dalam hal ini menggambarkan bahwa apabila suatu negara tidak mandiri dalam pemenuhan pangan, maka kedaulatan negara bisa terancam. Pada Undang-Undang Pangan sangat jelas menekankan pada pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat perorangan, dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermanfaat serta arif dan bijaksana.

Pelaksanaan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) ini merupakan implementasi dari Rencana Strategis Kementerian Pertanian yaitu Empat Sukses Pertanian, yang salah satunya ialah mengenai Peningkatan Diversifikasi Pangan, yang merupakan salah satu kontrak kerja antara Menteri Pertanian dengan Presiden RI pada tahun 2009-2014, dengan tujuan untuk meningkatkan keanekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik wilayah. Kontrak kerja ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal, yang ditindak lanjuti oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. Peraturan tersebut kini menjadi acuan untuk mendorong upaya penganekaragaman konsumsi pangan dengan cepat melalui basis kearifan lokal serta kerja sama terintegrasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Di tingkat Provinsi, kebijakan tersebut telah ditindak lanjuti melalui surat edaran atau Peraturan Gubernur (Pergub), dan di tingkat Kabupaten/Kota ditindak lanjuti dengan surat edaran atau Peraturan Bupati/Walikota (Perbup/Perwalikota).

Sebagai bentuk keberlanjutan program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumberdaya Lokal, program P2KP diimplementasikan melalui kegiatan: (1) Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), (2) Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L), serta (3) Sosialisasi dan Promosi P2KP. Melalui tiga kegiatan besar ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat untuk membentuk pola konsumsi pangan yang baik.

Gerakan P2KP sangat jelas di lapangan, terutama pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, baik itu melalui integrasi berbagai kegiatan dalam mewujudkan pengembangan ekonomi daerah, maupun dari segi pelaksanaan dan pembiayaannya. Selain itu, Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai integrator utama memiliki peranan penting dalam mengoordinasikan gerakan P2KP, khususnya terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai agen pembawa perubahan (*agent of change*).

Penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman ditingkat keluarga ditentukan oleh seorang Ibu yang berperan

sebagai *Center of Life* dan salah satu pembuat kebijakan dalam rumah tangganya. Dengan demikian, penyuluhan dan edukasi yang efektif bagi masyarakat khususnya perempuan dan ibu-ibu diharapkan dapat membuat perubahan pola makan yang lebih sehat bagi keluarganya untuk menghasilkan generasi yang tangguh dan unggul serta siap bersaing dengan bangsa lain dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean yang akan datang.

Pemerintah Kota Samarinda melalui Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah Kota Samarinda telah dan sedang melaksanakan program tersebut di beberapa tempat, khusus untuk di Kecamatan Samarinda Utara, Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dilaksanakan di Kelurahan Lempake dengan jumlah kelompok tani sebanyak 5 (lima) kelompok tani, yaitu: Kelompok Dasawisma Sawo Manila, Kelompok Wanita Tani Karya Mandiri, Kelompok Wanita Tani Sri Rezeki, Kelompok Wanita Tani Lestari, dan Kelompok Wanita Tani Berkat Usaha Bersama.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan serta untuk memahami penerapan pelaksanaan program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara maka penulis tertarik untuk mengelaborasi lebih jauh permasalahan terkait dengan pelaksanaan program tersebut.

Kerangka Konsep dan Teori *Implementasi Kebijakan Publik*

Implementasi (*implementation*) menurut kamus ilmiah populer mempunyai arti pelaksanaan atau penerapan implementasi kebijakan publik sebagai "*getting the job done and doing it*" dalam melaksanakan implementasi kebijakan menuntut adanya syarat antara lain adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi. Implementasi dalam hal ini merupakan proses mendapatkan sumber daya tambahan, sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan. Apa yang dikemukakan diatas paling tidak kebijakan memerlukan dua macam tindakan yang akan dilakukan; dan kedua, melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan tadi.

Menurut pendapat Nugroho (2003), Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (tidak lebih dan tidak kurang). Selanjutnya Nugroho (2003) mengemukakan bahwa perencanaan atau sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik. Konsep (yang didukung data dan informasi masa depan) kontribusinya mencapai proporsi sekitar 60 persen terhadap keberhasilan kebijakan tersebut dan proporsi sekitar 40 persen terhadap implementasi yang harus konsisten dengan konsep.

Dalam implemetansi kebijakan publik, terdapat dua pilihan langkah yang dapat dilakukan, yakni langsung mengimpelmentasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan devirat atau turunan dari kebijakan publik tersebut formulasi kebijakan devirat atau turunan dari

kebijakan publik tersebut. Pada prinsipnya, kebijakan bertujuan untuk melakukan intervensi. Dengan demikian, implementasi kebijakan pada hakekatnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri.

Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian bertujuan untuk menggambarkan fenomena melalui lensa-lensa dan mencari pola-pola hubungan konsep yang sebelumnya tidak ditentukan. Fokus penelitian yaitu terciptanya penganekaragaman pangan, beranekaragamnya konsumsi pangan masyarakat dan nilai ekonomis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, dan dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, (2014 : 33) yaitu dengan melalui tahapan-tahapan yaitu tahap pertama melakukan kondensasi data merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan/atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, melalui kondensasi, penulis membuat data lebih kuat.

Hasil dan Pembahasan

Kelompok Wanita Tani atau yang sering disebut KWT adalah sekelompok orang yang terdiri dari beberapa ibu-ibu rumah tangga yang memiliki kesamaan visi serta misi yaitu dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam membina dan melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga di tingkat Kelurahan pada umumnya dan pada tingkat rukun tetangga (RT) pada khususnya. Dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga, salah satu program yang telah dan sedang berjalan yaitu program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP).

Terciptanya Penganekaragaman Pangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan khususnya yang berkaitan dengan terciptanya penganekaragaman pangan, di kelurahan lempake sudah terwujud, ini dapat dilihat dengan para anggota kelompok wanita tani dan dasawisma didalam pola konsumsi pangan rumah tangganya sudah mengkonsumsi bermacam jenis sayuran yang mereka dapat dari hasil pemanfaatan pekarangan rumah tangga, sehingga pola pangan beragam dapat terwujud. Semakin beragam pola konsumsi pangan rumah tangga maka dengan sendirinya akan terciptanya / terwujudnya penganekaragaman pangan. Begitu pula sebaliknya apabila pola konsumsi pangan tidak beragam maka terciptanya / terwujudnya penganekaragaman pangan tidak dapat tercapai.

Beranekaragamnya Konsumsi Pangan Masyarakat

Setelah hasil penelitian yang sebelumnya menunjukkan bahwa terciptanya panganekaragaman pangan sudah terwujud, maka, hasil selanjutnya yaitu tentang beranekaragamnya konsumsi pangan masyarakat, temuan di objek penelitian menunjukkan bahwa implementasi program panganekaragaman pangan khususnya yang berkaitan dengan beranekaragamnya konsumsi pangan masyarakat, di kelurahan lempake sudah terlihat hal ini terbukti dengan adanya tanaman pengganti bahan pokok utama beras yang sudah dilakukan, yaitu seperti berbagai macam jenis ubi-ubian, jagung, kedelai, singkong dan beberapa jenis tanaman lainnya. Panganekaragaman pangan merupakan jalan keluar yang saat ini dianggap sangat baik untuk memecahkan masalah dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Melalui penataan pola makan yang tidak hanya bergantung pada satu sumber pangan memungkinkan masyarakat dapat menetapkan pangan pilihan sendiri, sehingga dapat membangkitkan ketahanan pangan keluarga masing - masing yang berujung pada peningkatan ketahanan pangan secara nasional dalam hal konsumsi pangan. Permasalahan yang dihadapi tidak hanya mencakup ketidak seimbangan komposisi pangan yang dikonsumsi penduduk, tetapi juga masalah masih belum terpenuhinya kecukupan gizi. Keanekaragaman konsumsi pangan selama ini sering diartikan terlalu sederhana berupa panganekaragaman konsumsi pangan pokok terutama pangan non beras. Panganekaragaman konsumsi pangan seharusnya mengkonsumsi aneka pangan dari berbagai kelompok pangan, baik pangan pokok, lauk pauk, sayur, maupun buah dalam jumlah yang cukup sehingga pemenuhan gizi dapat terpenuhi.

Nilai Ekonomis

Selanjutnya yaitu tentang adanya nilai ekonomis, temuan di objek penelitian menunjukkan bahwa implementasi program panganekaragaman pangan khususnya yang berkaitan dengan nilai ekonomis, di kelurahan lempake sudah ada kelompok wanita tani yang berhasil membuat dan mengolah serta memanfaatkan program tersebut menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis, dibuktikan dengan adanya produk-produk kelompok wanita tani sudah masuk di pasar modern seperti pasar swalayan. Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) tidak mempermasalahkan apabila disaat berjalannya kegiatan boleh menjadi nilai ekonomis bagi kelompok umumnya dan bagi anggota kelompok pada khususnya. Tujuan utama program ini adalah mengharapakan beragamnya pola konsumsi pangan rumah tangga, pemenuhan pola konsumsi pangan rumah tangga lebih diutamakan sekedar pemenuhan nilai ekonomis. Nilai ekonomis dapat dilakukan apabila pemenuhan pola konsumsi rumah tangga yang beragam bergizi seimbang dan aman telah terpenuhi, banyaknya komoditi sayuran yang ditanam dapat dijual baik berupa bibit tanaman dan hasil panen sehingga dapat dijadikan sebagai nilai tambah bagi kelompok wanita tani dan para anggota kelompok lainnya.

Faktor - Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Pada Kelompok Wanita Tani Di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara

Faktor Pendukung Implementasi Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Pada Kelompok Wanita Tani Di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, yaitu: (1) Adanya pendampingan terus menerus dari petugas penyuluh lapangan mengenai program tersebut baik secara terknis maupun pendampingan berupa penyampaian informasi; (2) Tingkat kesadaran masyarakat yang semakin meningkat mengenai program penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP); (3) Peran pemerintah dalam melakukan pembinaan kelompok wanita dan dasawisma.

Faktor Penghambat Pendukung Implementasi Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Pada Kelompok Wanita Tani Di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, yaitu: (1). Sulitnya para kelompok wanita tani menyelesaikan pengadministrasian baik saat sebelum pencairan dana bantuan maupun setelah pencairan dana. (2). Kurangnya kekompakkan para anggota kelompok wanita tani sehingga pelaksanaan program menjadi terhambat.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi program percepatan penganekaragaman pangan (P2KP) pada kelompok wanita tani di Kelurahan Lempake sudah berjalan dengan baik meskipun masih ada beberapa kendala administrasi kelompok baik sebelum pencairan dana maupun sesudah pencairan dana, hal ini disebabkan para penyuluh hanya fokus kepada pertanian sehingga terabaikan tentang pengadministrasian kelompok.
2. Kekompakkan suatu kelompok sangatlah penting sebagai penunjang program pemerintah agar dapat berjalan dengan baik. Kelompok wanita tani di Kelurahan Lempake masih terlihat kurangnya kekompakkan dan kerjasama sehingga pelaksanaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) tidak berjalan dengan baik. Hal ini terlihat pada kebun bibit, demplot, pekarangan anggota yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
3. Program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) di Kelurahan Lempake ini dimanfaatkan oleh para ibu - ibu rumah tangga yang selama ini hanya memiliki sedikit aktifitas dirumah selain mengurus rumah tangga, sehingga banyak waktu yang kosong hanya dipergunakan untuk bermain *handphone* dan ngobrol dengan tetangga lainnya tanpa ada menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Program ini

diharapkan mampu merubah kebiasaan ibu-ibu tersebut menjadi hal-hal yang lebih bermanfaat seperti menanam sayuran.

Saran-saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlunya melakukan evaluasi terhadap implementasi program penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) untuk Kota Samarinda.
2. Hendaknya semua pihak, baik pemerintah, kelompok wanita tani dan masyarakat memiliki komitmen dalam mensukseskan program tersebut.
3. Hendaknya dilakukan sistem rekrutmen pegawai yang lebih baik, sehingga mendapatkan sumberdaya manusia mempunyai latar belakang yang lebih mendukung program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP)
4. Hendaknya terhadap program implementasi program kelompok wanita tani penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) di Kelurahan Lempake terus diinformasikan secara utuh kepada masyarakat, sehingga diharapkan muncul kelompok-kelompok wanita yang lebih banyak lagi.
5. Peranan dari masyarakat juga dibutuhkan agar program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dapat berjalan dengan lancar. Maka dari itu, masyarakat diharapkan agar bisa membantu pemerintah dalam mengurangi konsumsi terhadap beras dan gandum dan mencoba untuk mengkonsumsi bahan baku non beras seperti sagu, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan lain sebagainya.
6. Meningkatkan kerjasama dan kekompakkan kelompok wanita tani.

Daftar Pustaka

- Anonim. 2009. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*.
- _____. 2009. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang *Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*.
- Badan Ketahanan Pangan. 2013. *Pedoman Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Tahun 2013*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Miles, M. B, Huberman, A. M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. Sage Publications: USA.
- Moleong, L. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Nugroho, 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Nugroho, 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan – Analisis Kebijakan – Proses*. Elex Media Komputindo: Jakarta.